

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama disetiap negara di dunia khususnya dinegara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya (Suhandi et al., 2020).

Inti dari masalah pengangguran dan ketenagakerjaan adalah tenaga kerja. Dilihat dari sudut pandang positif tenaga kerja merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk yang ada, sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh, konsekuensinya terciptalah pengangguran (Suhandi et al., 2021).

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah di Negara Indonesia yang memiliki permasalahan terakit Ketenagakerjaan dan Pengangguran. Hal dibuktikan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 berada pada urutan ke-3 terbesar dari 36 Provinsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran menjadi tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada BAB XII Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023.

Permasalahan Ketenagakerjaan dan pengangguran di Sumatera Barat lebih detail diidentifikasi dan dirumuskan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Rencana Strategis Disnakertrans Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam urusan tenaga kerja terdiri dari 4 program, 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Berikut jumlah program yang ada pada Disnakertrans:

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
- 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4) Program Hubungan Industrial

Berikut Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang meliputi:

- a. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) yang masih relatif tinggi
- b. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja dari berbagai sektor per kabupaten/kota
- c. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja
- d. Belum optimalnya Pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship).

Empat permasalahan pokok diatas berkaitan dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang juga merupakan tenaga kerja yang ada di Sumatera

Barat. Dan dari 4 Pokok permasalahan Provinsi Sumatera Barat tersebut yang tergolong dalam kategori Urusan Bidang Tenaga kerja adalah TPT yang masih tinggi dan rendahnya produktifitas tenaga kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan yang pertama yaitu tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menempati posisi ke-10 daerah dengan TPT Tertinggi di Indonesia dari 38 Provinsi yang ada, dengan persentase TPT 5,94 %. Berikut peneliti paparkan persentase jumlah Pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2023-2024. Kemudian Data Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat menempati rank ke-11 dengan TPT tertinggi di Indonesia dari 38 provinsi, dengan persentase TPT 5,75%. Sedangkan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Bulan Agustus tahun 2024 yaitu meliputi 2.924.753 Tenaga Kerja, 178.278 Pengangguran, dan 5,75% Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut Tabel Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Bulan Agustus Tahun 2023-2023.



Tabel 1.1
Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Bulan Agustus 2023 - 2024

PROVINSI	AGUSTUS 2023		AGUSTUS 2024	
	PENGANGGURAN (JIWA)	TPT (%)	PENGANGGURAN (JIWA)	TPT (%)
Aceh	157.107	6,03	152.929	5,75
Sumatera Utara	472.085	5,89	457.794	5,6
Sumatera Barat	179.505	5,94	178.278	5,75
Riau	132.454	4,23	121.361	3,7
Jambi	85.576	4,53	86.075	4,48
Sumatera Selatan	188.511	4,11	179.709	3,86
Bengkulu	37.845	3,42	35.339	3,11
Lampung	207.242	4,23	209.161	4,19
Kepulauan Bangka Belitung	35.812	4,56	37.214	4,63
Kepulauan Riau	74.330	6,8	71.572	6,39
DKI Jakarta	354.496	6,53	337.992	6,21
Jawa Barat	1.888.287	7,44	1.768.226	6,75
Jawa Tengah	1.080.260	5,13	1.047.451	4,78
D,I, Yogyakarta	81.984	3,69	78.667	3,48
Jawa Timur	1.165.587	4,88	1.020.651	4,19
Banten	448.432	7,52	414.754	6,68
Bali	72.421	2,69	48.676	1,79
Nusa Tenggara Barat	83.243	2,8	87.011	2,73
Nusa Tenggara Timur	93.815	3,14	94.216	3,02
Kalimantan Barat	120.789	4,2	146.201	4,86
Kalimantan Tengah	52.509	3,67	58.631	4,01
Kalimantan Selatan	84.913	3,89	93.256	4,2
Kalimantan Timur	115.523	5,75	107.022	5,14
Kalimantan Utara	14.386	4,01	15.343	3,9
Sulawesi Utara	79.926	5,98	81.180	5,85
Sulawesi Tengah	49.624	3,15	48.434	2,94
Sulawesi Selatan	230.674	4,9	204.760	4,19
Sulawesi Tenggara	45.034	3,22	45.572	3,09
Gorontalo	19.918	3,05	20.404	3,13
Sulawesi Barat	23.379	3,02	20.876	2,68
Maluku	56.537	5,96	59.100	6,11
Maluku Utara	27.857	4,16	27.747	4,03
Papua Barat	13.702	4,31	12.511	4,13
Papua Barat Daya	18.929	6,02	20.627	6,48
Papua	29.634	5,81	31.773	6,48
Papua Selatan	10.483	4,75	9.554	4,05
Papua Tengah	20.901	2,49	22.047	2,75

Papua Pegunungan	11.957	1,18	13.485	1,32
------------------	--------	------	--------	------

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2024" Hlm 12-13

Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 tidak mengalami penurunan yang signifikan. berikut Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 :

Tabel 1.2
Data Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

Tahun	Bulan	TPT	Jumlah Pengangguran
2021	Februari	6,67	184.555
	Agustus	6,52	179.948
2022	Februari	6,17	177.215
	Agustus	6,28	180.106
2023	Februari	5,90	176.968
	Agustus	5,94	179.505
2024	Februari	5,79	178.838
	Agustus	5,75	178.278

Sumber : Hasil olahan Peneliti dari Dokumen Publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021-2024

Tabel diatas menggambarkan kondisi jumlah pengangguran di Sumatera Barat selama 4 tahun terakhir. Jika dilihat dan dibandingkan jumlah pengangguran pada Bulan Agustus tahun 2021 dengan Bulan Agustus tahun 2024 hanya selisih 1.670 jiwa pengangguran. Dengan kata lain secara angka, jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Barat tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Secara umum pengangguran terjadi karena jumlah angkatan kerja yang melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 2,92 juta orang penduduk yang bekerja dan 178,28

ribu orang pengangguran. Untuk memperkuat secara detail permasalahan pengangguran terbuka di Sumatera Barat berikut peneliti paparkan tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023-2024.

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

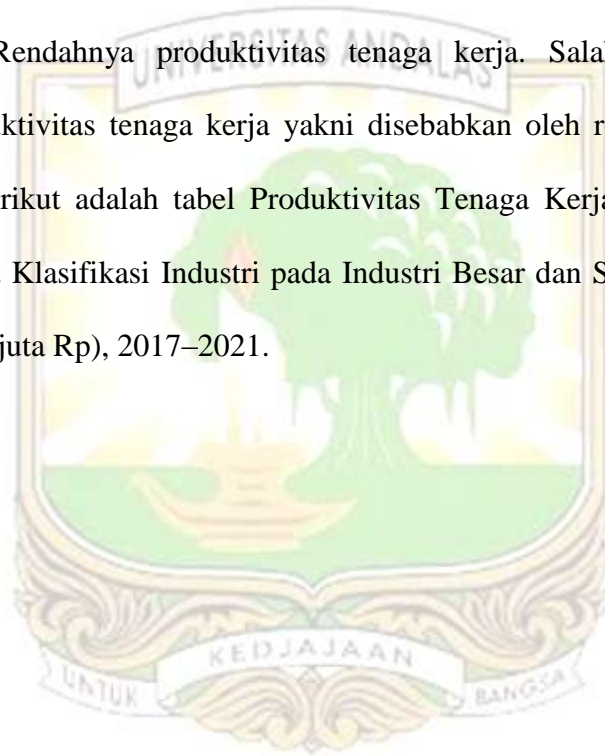
NO	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
		Bulan Agustus			
1	SD	4,03	4,63	2,49	3,01
2	SMP	6,31	4,81	5,19	3,7
3	SMA	7,71	8,47	8,98	8,07
4	SMK	8,8	6,69	7,6	9,18
5	Diploma I/II/III	8,35	6,03	7,5	7,6
6	DIV, S1, S2, S3	8,09	6,7	7,55	6,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, "Laporan Bulanan Data Sosial-Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Bulan Oktober 2024"

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan bulan Agustus tahun 2024, kategori yang mempunyai rasio TPT terbesar adalah penduduk tamatan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) dengan masing-masing persentase 8,07% dan 9,18%. Kemudian diikuti dengan penduduk lulusan perguruan Tinggi dengan rincian, lulusan Diploma I/II/III 7,6% dan lulusan DIV, S1, S2, S3 adalah 6,73%. Hal ini menjelaskan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Sumatera Barat sehingga mengakibatkan dan menimbulkan permasalahan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi

yang didominasi oleh penduduk lulusan Sekolah menengah Atas dan kejuruan serta Perguruan Tinggi. Tentu berdasarkan data-data yang telah dipaparkan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki benang merah penyebab tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka. Dan berdasarkan data-data dan analisis yang tepat Pemerintah Daerah Sumatera Barat akan mampu merumuskan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang efektif dan efisien sebagai bentuk solusi dan penanggulangan dari masalah tersebut.

Kedua, Rendahnya produktivitas tenaga kerja. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja yakni disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga kerja. Berikut adalah tabel Produktivitas Tenaga Kerja (Terhadap Nilai Output) Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Barat (juta Rp), 2017–2021.



Tabel 1.4
Produktivitas Tenaga Kerja (Terhadap Nilai Output) Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Barat (juta Rp), 2017–2021

NO	Klasifikasi Industri	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Makanan	2.686,01	2.132,75	4.403,68
2	Minuman	214,04	258,34	972,26
3	Pengolahan Tembakau	NA	NA	NA
4	Tekstil	1.600,84	1.547,47	313,97
5	Pakaian jadi	125,44	28,61	37,73
6	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	NA	NA	NA
7	Kayu, barang dari kayu dan gabus(tidak termasuk furnitur), dan barang–barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	NA	NA	NA
8	Kertas dan barang dari kertas	NA	NA	128,32
9	Percetakan dan reproduksi media rekaman	218,22	143,88	129,24
10	Produk dari batu bara dan hasil penghilangan minyak bumi	NA	NA	NA
11	Kimia dan barang–barang dari bahan kimia	1.878,31	1.986,74	2.422,18
12	Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	NA	NA	NA
13	Karet dan barang dari karet dan plastic	1.561,74	1.333,19	1.544,47
14	Barang galian bukan logam	2.476,67	1.989,55	2.434,80
15	Logam dasar	–	–	–
16	Barang–barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya	205,75	158,31	678,98
17	Komputer, Barang elektronik dan optik	–	–	–
18	Peralatan listrik/Electrical Instruments	NA	NA	NA
19	Mesin dan perlengkapan	NA	NA	NA
20	Kendaraan bermotor	–	–	–
21	Alat angkutan lainnya	–	–	–
22	Furnitur	208,73	213,79	210,64
23	Industri Pengolahan lainnya	182,08	–	NA
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	NA	NA	NA
Sumatera Barat		2.080,68	1.861,32	2.959,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2024

Tabel produktivitas tenaga kerja diatas masih tergolong rendah jumlahnya, hal ini dijelaskan oleh Disnakertrans Sumatera Barat dalam Renstra Disnakertrans Tahun 2021-2026. Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia atau tenaga kerja atau angkatan kerja yang ada di Sumatera Barat. Permasalahan ini kemudian di atasi oleh Disnakertrans dengan cara bersinkronisasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan yang menyediakan pelatihan-pelatihan kerja gratis yang dibiayain oleh APBN.

2 Permasalahan pokok urusan tenaga kerja tersebut menjadi landasan utama bagi Disnakertrans dalam membuat dan mengimplementasikan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dan Program ini memiliki sasaran strategis "Meningkatnya kualitas tenaga kerja". Berikut peneliti paparkan lebih rinci terkait program tersebut:



Tabel 1.5

Program: Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.		
No	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		3. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
3	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Menengah
4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber : Renstra Disnakertrans Tahun Anggaran 2021-2026

Jika dilihat dari paparan tabel diatas, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 4 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Kemudian Kegiatan yang memiliki target secara langsung bersinggungan dengan tenaga

kerja adalah kegiatan pertama ” Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi”. Bukan hanya itu Sasaran Staregis dari Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, maka Pelaksanaan Latihan Kerja menjadi kegiatan yang paling relate dalam pencapaian sasaran strategis ini.

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1 (Satu) Meningkatnya kualitas tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari persentase tenaga kerja yang kompeten. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan SDM pencari kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja.
 1. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) baik BLK Pusat (BPVP), Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Target pencari kerja yang berkompoten melalui pelatihan kerja sebesar 35,75%, dengan realisasi sebesar 41,50% sehingga capaian pencari kerja yang berkompoten sebesar 117,66%.
 2. Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat pada Tahun 2023 adalah sebanyak 7.980 dari 19.229 pencari kerja terdaftar Tahun 2022.
 3. Selama 4 Tahun terakhir telah banyak dilakukan pelatihan-pelatihan kerja oleh Balai Latihan Kerja (BLK) baik BLK Pusat (BPVP), Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta. Namun persoalan Tingkat Pengangguran yang Tinggi tidak serta merta langsung berkurang atau mengalami penurunan yang drastis.

Berikut data Pelatihan-pelatihan kerja yang telah diimplementasikan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023:

Tabel 1.6
Perkembangan Pelatihan Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan di Sumatera Barat Tahun 2023

Instansi Pelaksana	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	Pelatihan Peningkatan Produktivitas (P3)	Wira Usaha Baru (WUB)/Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM)/Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Pemagangan Dalam Negeri	Total (orang)
BLK se Sumatera Barat	2.581	0	0	0	2.581
BPVP	1.216	0	0	0	1.216
Disnakertrans Prov Sumbar	1.840	225	100	242	2.407
Pelatihan OPD terkait	0	0	0	0	0
Lembaga Kerja Swasta	1.776	0	0	0	1.776
Total	7.413	225	100	242	7.980

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disnakertrans Tahun 2023

b. Meningkatkan Kualitas dan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melalui Bimtek dan Akreditasi LPK.

1. Melalui anggaran APBD maupun APBN, Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 telah melaksanakan pembinaan terhadap LPK yang ada di Sumatera Barat melalui Bimtek Akreditasi LPK (2 angkatan @20 LPK), serta peningkatan kualitas LPK melalui Akreditasi sebanyak 20 LPK (APBN) dan 2 LPKS (APBD).

2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah diakreditasi akan diberikan sertifikat akreditasi dari Lembaga Akreditasi Pelatihan Kerja (LA-LPK) melalui Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
3. Masa berlaku status akreditasi adalah 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan kembali untuk diakreditasi ulang, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya/status akreditasi.
4. Lembaga pelatihan kerja berkembang cukup pesat, namun dari segi jenis dan kualitasnya kurang mendukung perkembangan dunia industri, sebab sebagian besar Lembaga Pelatihan Kerja kebanyakan menyelenggarakan pelatihan dibidang jasa dan hanya beberapa yang menyelenggarakan pelatihan dibidang teknik dan industri. Walaupun Lembaga pelatihan kerja berkembang cukup pesat, namun dari segi jenis dan kualitasnya kurang mendukung dan belum bersinergi dengan perkembangan dunia industri, sebab Berdasarkan data dari Sistem Kelembagaan Kemnaker RI, Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki:
 - 121 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dimana telah terakreditasi sebanyak 166 program
 - 15 Balai Latihan Kerja milik pemerintah, dimana 13 BLK telah terakreditasi
 - 75 BLK Komunitas, sebanyak 16 BLKK telah terakreditasi

Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus dan intensif terhadap Lembaga Pelatihan Kerja khususnya lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), agar pelatihan yang diselenggarakan mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat bersaing secara kompetitif baik didalam maupun di pasar global.

c. Pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui berbagai perusahaan skala besar yang ada di Sumatera Barat, dan setelah 6 (enam) bulan magang 60 % s.d 65 % kemudian diterima sebagai karyawan tetap.

1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara langsung dalam proses produksi barang atau jasa di tempat kerja, dibawah bimbingan dan pengawasan pelatih atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai kompetensi kerja tertentu. Pemagangan merupakan konsep belajar sambil bekerja, sehingga dengan pemagangan maka peserta akan mendapatkan pengalaman kerja pada dunia kerja yang sesungguhnya, disamping sebagai salah satu upaya untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten dan siap kerja.

2. Pemagangan dalam Negeri adalah pemagangan yang diselenggarakan diperusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan

Berikut adalah Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan 6 (enam) sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut:

Tabel 1.7
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	35,72 %	41,50 %	117,66%
2	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	36,01 %	68,23 %	189,48%
3	Meningkatnya Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	62,87 %	84,27 %	134,04 %
4	Berkembangnya Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Satuan Permukiman Transmigrasi (IPSP)	40,00	75,89	189,73 %
		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans)	72,08	72,08	100 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)	BB (72,26)	97,77 %
6		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	81,67%	93,02%	113,90 %

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disnakertrans Tahun 2023

Kemudian Pada Tahun 2024 Disnakertrans juga telah merilis Capaian Kinerja pada rentang waktu Januari-Agustus 2024 yang dipaparkan pada gambar 1.5 berikut.

Gambar 1.1
Capaian Kinerja Disnakertrans Januari-Agustus 2024



Sumber : Publikasi Portal Website Resmi Disnakertrans

Gambar 1.5 diatas menjelaskan bahwa ada 5 poin capaian kinerja Disnakertrasn pada Bulan Januari-Agustus 2024 yaitu sebagai berikut:

1. 609 Pencari Kerja ditempatkan melalui Job Fair
2. 2.921 Tenaga Kerja dilatih melalui Pelatihan Kompetensi
3. 369 UMKM diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja Pola Grameen Bank

4. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kategori Pelatihan dan Kompetensi Kerja Terbaik
5. 25 Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja sejak Tahun 2021
6. 2 Perusahaan menerima Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja Kategori Gold
7. 14 Perusahaan menerima Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Tenaga Kerja.

Capaian Kinerja Disnakertrans pada dasarnya adalah hasil perhitungan indikator-indikator kinerja dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis. Indikator-Indikator kinerja tersebut dinilai melalui perbandingan persentase realisasi capaian terhadap persentase target yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Apakah sasaran strategis “Meningkatnya kualitas tenaga kerja” di Sumatera Barat tercapai.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga

Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan pengetahuan administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian tentang Ilmu Administrasi Publik terutama pada konsentrasi kebijakan publik, yaitu tentang implementasi kebijakan publik pada pemerintahan daerah Provinsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait pemerintahan, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

